
Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 1 (1): 30-06, 2020

ISSN: 2686-5157



**DESAKAN KELOMPOK NEOKONSERVATIF AMERIKA
DI MASA PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH UNTUK MELAKSANAKAN
KEBIJAKAN RADIKAL TERHADAP IRAN**

Nurul Ashri

Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang
Jln. Surya Kencana No. 1 Pamulang Barat Tangerang Indonesia

Abstrak - Penelitian ini membahas tentang sistem politik Amerika Serikat di masa George W. Bush yang digerakkan oleh kelompok Neokonservatif. Di dalam pemerintahan Bush, kelompok Neokonservatif menerapkan agenda kebijakan luar negeri yang radikal terhadap Iran yaitu dengan intervensi militer. Alasannya adalah Iran mengembangkan program nuklir, mendukung kelompok teroris, menyangkal adanya *Holocaust* dan mendominasi kawasan minyak di Timur tengah. Dalam merealisasikan agendanya, kelompok kepentingan Neokonservatif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lembaga legislatif dan lembaga eksekutif Amerika. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal dan internet sebagai sumber informasi. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan teknik penulisan deskriptif untuk mengungkapkan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: *Kelompok Neokonservatif, Agenda Kebijakan Iran dan Intervensi Militer.*

Abstract - *This research is talking about the United States political system in the period of Bush administration which was controlled by Neoconservative group. In the Bush administration, Neoconservative group determined a radical foreign policy of Iran by applying military intervention. Some reasons of their action included Iran had developed nuclear program, supported terrorist group, denied the existence of Holocaust and dominated the vital area of oil in Middle East. In order to realize their policy window, Neoconservative group applied a significant influence in legislative and executive agency of United States. This research focused on library research by observing some books, journals and websites as the source of information. Furthermore, this research was written in the descriptive text to describe and reveal a particular experience as a worth contribution of science.*

Keywords: *Neoconservative Group, Iran Policy Window and Military Intervention.*

Corresponding Author: Nurul Ashri, dosen00635@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran dimulai sejak Revolusi Islam Iran. Pada tahun 1979, terjadi revolusi besar di Iran. Revolusi ini menggulingkan pemerintahan Shah Reza Pahlevi yang didukung oleh Amerika Serikat. Ketika revolusi berlangsung, bentrokan antara pengunjuk rasa pendukung Ayatollah Khomeini dan tentara Shah Iran yang dipersenjatai senapan G3 buatan Belgia terjadi di pusat kota dan menyebar hingga ke Kawasan terpencil (Naji, 2009). Dalam kerusuhan tersebut, para pendukung Khomeini berhasil mengambil alih semua pusat kekuasaan pemerintahan Shah Iran dan berhasil menggulingkan kekuasaan Shah Iran. Pada 11 Februari 1979, para pendukung Khomeini tersebut menyatakan kemenangan sebuah revolusi yang mendudukkan Ayatollah Ali Khomeini menjadi pemimpin Iran.

Sejak Khomeini menjadi pemimpin Iran, ia bertekad untuk menghilangkan segala bentuk pengaruh Amerika di Iran dan di seluruh dunia. Dalam setiap khutbah shalat jumat di Teheran, Ayatulloh Khomeini selalu mengatakan, “rezim Amerika Serikat merupakan musuh pemerintahan Islam (Iran) dan revolusi kita. Amerika Serikat itu musuh revolusi kalian, imam Islam kalian dan perlawanan kalian terhadap kejahatan Amerika Serikat” (*Associated Press*, 2005). Khomeini juga mengatakan bahwa segala bentuk hubungan dengan Amerika Serikat bisa membahayakan kemerdekaan Iran dan kemajuan Islam di seluruh dunia. Maka ia pun menyerukan perang suci melawan Amerika. Dalam pidato di hadapan rakyat Iran, ia pernah mengatakan, “peperangan melawan agresi, ketamakan, rencana dan kebijakan Amerika dianggap jihad, dan siapa pun yang terbunuh dalam perang tersebut adalah syuhada” (Naji, 2009).

Pada 4 November 1979, para pendukung Khomeini bergabung dalam gerak jalan menuju gedung bata merah kedutaan Amerika Serikat di pusat kota Teheran. Begitu sampai di kedutaan Amerika, para pendukung Khomeini ini berlari memasuki gedung kedutaan dan meneriakki kata-kata “matilah Amerika”. Setelah memasuki gedung, mereka menguasai seluruh kompleks kedutaan dan menyandera diplomat, staf dan prajurit marinir Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter berupaya melakukan intervensi militer untuk membebaskan sandera Amerika tersebut. Namun upaya Presiden Carter tersebut mengalami kegagalan dikarenakan gangguan badai pasir yang mengakibatkan kecelakaan maut pada beberapa pesawat Amerika Serikat pembebas sandera ketika sedang melaksanakan operasi penyelamatan sandera (Pitaya, 2009).

Pemerintahan berikutnya, Ronald Reagan menempuh upaya diplomasi untuk membebaskan sandera warga Amerika tersebut dengan mengirimkan senjata ke Iran untuk ditukarkan dengan para sandera. Upaya yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat berhasil. Para sandera tersebut akhirnya dibebaskan setelah disandera selama 444 hari. Akibat peristiwa ini, Iran dikenai sanksi ekonomi selama 30 tahun oleh Amerika Serikat (Naji, 2009).

Pada masa pemerintahan Bill Clinton, Iran berniat menormalisasikan kembali hubungan dengan Amerika Serikat. Saat itu Presiden Iran Mohammad Khatami berminat untuk melakukan perdamaian dengan Amerika Serikat. Presiden Clinton menerima niat perdamaian yang diupayakan oleh Presiden Khatami tersebut (Mearsheimer dan Walt, 2010). Presiden Clinton mengatakan, “yang kami inginkan ialah perdamaian tulus dengan Iran...kami percaya Iran kini tengah berubah ke arah yang positif dan kami ingin mendukung perubahan itu” (*Associated Press*, 1998).

Pada tahun 1998 ada titik temu perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Titik temu itu terjadi ketika pegulat Amerika, Zeke Jones menjadi atlet tamu dalam olahraga nasional Iran yaitu gulat di stadion Azadi, pinggiran barat kota Teheran. Presiden Khatami mengundang atlet Amerika Serikat tersebut sebagai bagian dari upaya normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat. Khatami mengatakan, “untuk menyiapkan perubahan dan menciptakan kesempatan mempelajari situasi baru, tembok ketidakpercayaan itu harus runtuh dulu”. Pada akhir turnamen final Turnamen Gulat Gaya Bebas Internasional Piala Takhti pada 20 Februari 1998, Jack Jones melambaikan bendera Iran kecil di tengah ring sambil berlari-lari mengelilingi arena. Sementara itu, Kevin Jackson dari Lansing, Michigan, memberikan salam *high five* khas Amerika Serikat kepada ratusan penggemar di Iran yang mengelu-elukan para atlet Amerika tersebut. Saat penyerahan medali, Melvin Douglas dari Topeka, Kansas, mengangkat gambar Ayatulloh Ali Khomeini tinggi-tinggi. Sebelumnya Melvin Douglas mengalahkan pegulat nomor satu Iran, Abbas Jadidi. Saat Jadidi dikalahkan, Douglas langsung mendatangi sudut lawan dan memeluknya di hadapan penonton (*Reuters*, 1998). Kemudian pada September 1998, tim gulat dari Amerika Serikat kembali tiba di Iran untuk bertanding dalam Kejuaraan Gulat Dunia. Masyarakat Iran kembali mendukung tim Amerika Serikat dan mendukung tim sendiri. Lagu kebangsaan Amerika Serikat diperdengarkan kembali. Bendera Amerika pun kembali dinaikan di arena olahraga itu dengan diiringi sorak sorai 12.000 penonton yang berulang-ulang berteriak ‘Amerika! Amerika!’ (*Reuters*, 1998).

Kubu garis keras Iran menganggap hal tersebut sebagai suatu pencederaan Revolusi 1979. Kubu garis keras Iran segera melakukan tindakan untuk menghentikan program-program reformis Presiden Khatami tersebut. Mereka memerintahkan media garis keras untuk melakukan serangan pada setiap indikasi yang mengarah ke perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Mereka juga memerintahkan Lembaga Yudikatif Iran

untuk menutup surat kabar kaum reformis. Lembaga Yudikatif juga menghukum beberapa menteri dalam pemerintahan Khatami yang salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri Abdullah Nouri. Ia didakwa dan dijebloskan ke penjara karena menganjurkan pemulihan hubungan dengan Amerika Serikat. Selain Abdullah Nouri, tokoh reformis Iran terkenal lainnya yang namanya dirahasiakan juga dipenjarakan setelah pengadilan memvonisnya bersalah atas tuduhan melakukan mata-mata karena menyelenggarakan jejak pendapat yang mengungkapkan bahwa 74 persen warga Iran menginginkan pemerintah Iran melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat (Naji, 2009).

Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat menjadi lebih buruk ketika George W. Bush menjadi pemimpin Amerika Serikat dan Mahmoud Ahmadinejad menjadi pemimpin Iran. Ketegangan hubungan di antara Amerika Serikat dan Iran semakin meningkat ketika Presiden Bush dalam pidato *State of The Union* pada akhir Januari 2002, menyebutkan bahwa Iran merupakan bagian dari poros kejahatan negara-negara teroris bersama Irak dan Korea Utara (Shoelhi, 2007).

Ketegangan hubungan ini semakin diperparah oleh publikasi presiden terpilih Iran Mahmoud Ahmadinejad kepada dunia internasional untuk menghancurkan Amerika Serikat. Dalam perbincangan dengan para pejabat tinggi Iran, ia pernah mengungkapkan bahwa “zaman kejayaan Amerika Serikat sudah hamper berlalu dan Iran harus berusaha secara maksimal untuk mempercepat keruntuhan Amerika Serikat” (Naji, 2009). Ia juga mengungkapkan bahwa “suatu hari nanti, Iran dan Amerika Serikat akan saling berhadapan dalam suatu perang” (*Associated Press*, 2005).

Kesungguhan Iran untuk berhadapan dengan Amerika dalam suatu perang dibuktikannya dengan melakukan serangkaian latihan militer. Berdasarkan suatu informasi yang didapat dari situs *online Washington Post* tahun 2007, diketahui

bahwa pada tahun 2006, Pasukan Pengawal Revolusi Iran mengadakan latihan militer Angkatan Laut dan Angkatan Udara selama dua hari. Menurut beberapa laporan media Iran dalam situs ini yang namanya dirahasiakan, pasukan yang ambil bagian dalam latihan militer ini ialah pasukan rudal Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari Pasukan Pengawal Revolusi Iran. Latihan militer ini dilakukan untuk menghadapi sejumlah besar pasukan militer dari Amerika Serikat (*Washington Post*, 2007).

Dalam latihan ini, Iran juga melakukan uji coba sistem rudal penangkis serangan udara tipe 'TOR-MI'. Menurut laporan media Iran lainnya yang namanya juga dirahasiakan, pasukan Iran melakukan latihan militer di Teluk Persia dan di markas Angkatan Udara Oman. Pada hari pertama latihan militer, tantara Iran berhasil menembakkan rudal penangkis serangan udara tipe 'TOR-MI' yang diimpor dari Rusia (*Washington Post*, 2003).

Ketika Iran sedang melakukan latihan perang, rekaman video yang disiarkan Stasiun Televisi Nasional Iran menunjukkan, di suatu padang pasir, ketika beberapa rudal penangkis serangan udara ditembakkan, rudal-rudal ini berhasil mengenai sasaran di udara. Sistem rudal penangkis serangan udara itu merupakan satu-satunya sistem pertahanan udara yang maju di dunia dewasa ini dan yang dapat menangkap, membedakan serta mengunci 48 sasaran pukulan di udara secara serempak. Sistem itu dapat melacak dan segera menembak secara tepat dua sasaran militer pada ketinggian 6000 meter sampai 20.000 meter di udara, serta dapat dengan cepat menembak sekali lagi. Menurut kontrak yang ditandatangani Iran dan Rusia pada bulan November tahun 2005, Rusia akan kembali memberikan sistem rudal penangkis serangan udara senilai 1,4 miliar dolar AS kepada Iran. Selain itu, selama tahun 2006, Iran pernah mengadakan latihan militer dalam skala besar sebanyak tiga kali. Setelah memasuki tahun 2007, Iran berturut-turut mengadakan latihan militer sebanyak dua kali dalam waktu kurang dari satu bulan. Latihan militer yang dilakukan Iran ini

diadakan selama kegiatan perayaan genap 29 tahun kemenangan Revolusi Islam Iran. Menteri Pertahanan Iran, Mustafa Mohammad Najjar dalam pidatonya kepada media Iran menyatakan dengan tegas tentang kesiapan Iran untuk mengantisipasi ancaman militer yang mungkin dilancarkan Amerika terhadap sarana nuklir Iran (*Washington Post*, 2007).

Dengan demikian, latar belakang ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran telah membuat sekelompok orang Amerika yang mempunyai kekuatan besar, berusaha untuk memberikan pengaruh di dalam pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh George W. Bush. Kelompok tersebut dikenal dengan nama kelompok Neokonservatif. Kelompok Neokonservatif berupaya menerapkan agenda yang menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri Amerika yang radikal di Iran, yaitu intervensi militer.

Latar belakang tersebut juga menghasilkan dua rumusan masalah. Pertama, pertanyaan yang mencakup alasan kaum Neokonservatif menerapkan kebijakan intervensi militer terhadap Iran. Kedua, pertanyaan yang mencakup cara kaum Neokonservatif menerapkan kebijakan militer terhadap Iran.

Selain itu, berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini dihasilkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal dan internet sebagai sumber informasi; membaca dan memahami data yang diperoleh; menyeleksi dan menghimpun semua data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian; membuat rumusan masalah; meneliti dan menghubungkan data-data yang telah dihimpun dengan teori yang ada dan dengan objek penelitian. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan teknik penulisan deskriptif untuk mengungkapkan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

KONTEN

KELOMPOK NEOKONSERVATIF

Dengan mengacu pada buku karya Ikenberry tahun 2001 yang berjudul *American Grand Strategy in The Age of Terror*, karakter kebijakan luar negeri Amerika Serikat terbagi menjadi dua yaitu *social welfare* dan *laissez faire*. *Social welfare* menekankan bahwa perlindungan kedaulatan Amerika adalah dengan membentuk pemerintahan demokrasi yang mandiri melalui sistem pemilihan umum. Immanuel Kant bahkan menyarankan bahwa pembentukan demokrasi di setiap negara adalah dengan membentuk pemerintahan Republik. Sedangkan *laissez faire* menekankan bahwa perlindungan kedaulatan Amerika adalah dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang berarti melakukan imperialisme (Ikenberry, 2001).

Kelompok Neokonservatif termasuk kelompok yang menyerap karakter *laissez faire* dalam arah politik luar negerinya. Dari karakter *laissez faire* ini, mereka menjadi pengusung Neoliberalisme di Amerika Serikat. Neoliberalisme adalah sebuah paham yang menempatkan pasar sebagai satu-satunya hal yang mengatur kegiatan ekonomi. Orientasi kesejahteraan dalam Neoliberalisme menekankan pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain, neoliberalisme atau kapitalisme merupakan kegiatan produksi yang diorientasikan untuk kepentingan pasar dan dilakukan oleh individu atau bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Berger, 1986).

Dalam Neoliberalisme, pihak swasta (korporasi) menjadi penguasa baru dalam sebuah negara dan terkadang kekuasaannya melebihi negara itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Martin Merger dalam bukunya yang berjudul *Elites and Masses* pada tahun 1987 bahwa, “*the capitalist do not necessarily govern, in the sense of occupying political offices, but that they rule, by controlling political officials and institutions*” (Merger, 1987: 42). Di sisi lain, pemerintah menjadi pihak yang selalu

memprioritaskan kepentingan korporasi besar tersebut dan tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Intervensi pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi justru difokuskan terhadap penyelamatan asset dan kepentingan pihak korporasi tersebut (Sukarwo, 2009).

Kaum Neokonservatif menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh ekspansi dan profitabilitas dari sektor swasta, kebijakan pemerintah yang baru yang mendukung pengaktifan peran swasta dan masyarakat dalam perbaikan ekonomi (Sukarwo, 2009). Dalam konteks hubungan internasional, kaum ini mempunyai tujuan khusus yaitu *restoring the United States to its world leadership position* (Ibid, hlm.96). Mereka menganggap pentingnya usaha menjaga stabilitas keamanan internasional yang kemudian dianggap sama pentingnya dengan usaha pembaruan perekonomian (Sukarwo, 2009).

Di Amerika Serikat, paham Neoliberalisme mencapai puncaknya pada era Presiden Ronald Reagan. Pada era tersebut, peran dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian banyak dikurangi. Presiden Ronald Reagan terkenal dengan program ekonominya yang disebut *New Federalism*. Program tersebut merupakan pembenahan dari program *New Deal* yang diprakarsai di era Presiden Roosevelt pascaperang dunia kedua (Tindall, 1984). Pada masa selanjutnya, kebijakan ekonomi Reagan dalam *New Federalism* dikenal dengan sebutan *Reaganomics* (Heertz, 2003).

Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan besar dalam *Reaganomics*: (1) Memberikan potongan pajak bagi kalangan pebisnis sebesar tiga puluh persen selama tiga tahun; (2) Penghapusan berbagai macam hambatan perdagangan dan subsidi; (3) Mengurangi pengurangan federal sehingga negara mulai melepaskan diri dari tanggung jawab membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk public, kecuali sektor pertahanan (Suroso, 1995: 27)

Reaganomics memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut: (1) Pengeluaran pemerintah federal dan pajak harus dipotong secara tajam; (2) Pemerintah akan memusatkan perhatiannya pada penyehatan ekonomi Amerika jangka panjang dan tidak sekedar untuk mencoba memperlancar kegiatan di lingkungan bisnis; (3) upah dan harga akan ditentukan oleh kekuatan pasar, artinya control atas upah dan harga semata-mata hanya untuk upaya-upaya pengendalian inflasi; (4) deregulasi (Ibid, hlm.52).

Beberapa orang Neokonservatif di dalam pemerintahan Bush adalah mantan para pejabat tinggi selama masa kepresidenan Reagan. Pada masa pemerintahannya, tokoh-tokoh Neokonservatif seperti Paul Wolfowitz, Douglas Feith, Stephen Cambone, Dov Zakheim, John Bolton, Elliot Abrams, Zalmay Khalilzad, Richard Perle dan Lewis I. Libby berperan menerapkan ide-ide radikal. Colin Powell adalah anggota kelompok Neokonservatif yang menerapkan ide-ide pre-emptive defense di dalam pemerintahan Bush. Sementara itu, Donald Rumsfeld selalu memegang posisi Menteri Pertahanan baik dalam kepresidenan Reagan maupun kepresidenan Bush. Donald Rumsfeld dan Collin Powell adalah orang yang berada dibalik serangan Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003 (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Berikut ini adalah nama-nama lain anggota kelompok Neokonservatif di dalam pemerintahan George W. Bush yang berpengaruh.

Richard Armitage, adalah mantan Deputy Menteri Luar Negeri selama George W. Bush periode pemerintahan pertama (2001-2004). Ia memainkan peran sentral kunci pasca serangan 9/11. Ia melakukan negosiasi dengan Pakistan menjelang invasi ke Afghanistan pada bulan Oktober 2001. Pada era Reagan, ia menjabat sebagai Asisten Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Keamanan Internasional. Ia memainkan peran penting dalam pelaksanaan NSDD 163 dan juga memastikan hubungan dengan

militer Pakistan dan aparat intelijennya (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Paul Wolfowitz dari Departemen Luar Negeri bertanggung jawab atas tim kebijakan luar negeri yang beranggotakan Lewis Libby, Francis Fukuyama dan Zalmay Khalilzad. Kelompok Wolfowitz juga terlibat dalam peletakkan dasar konseptual dukungan rahasia Amerika Serikat kepada partai-partai dan organisasi Islam di Pakistan dan Afghanistan (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Zalmay Khalilzad menulis draf *Defence Policy Guidance* (DPG) pada tahun 1992. Dalam DPG 1992 tersebut dituliskan bahwa Amerika Serikat harus membangun kekuatan militer dalam kapasitas besar untuk menata dunia. Kekuatan militer tersebut adalah untuk menata Kawasan vital di Timur Tengah (Mearsheimer dan Walt, 2010).

KEBIJAKAN RADIKAL KELOMPOK NEOKONSERVATIF DI IRAN

Neokonservatif terdiri dari sekumpulan orang-orang yang berkeinginan untuk menegakkan kepemimpinan Amerika Serikat di dunia. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama PNAC (*Project for New American Century*). Organisasi ini didirikan pada tahun 1997 sebagai sebuah organisasi untuk meningkatkan kepemimpinan global Amerika. Para pengurus proyek ini adalah William Kristol yang menjabat sebagai ketua serta para direktur seperti Robert Keagan, Devon Gaffney Cross, Bruce P. Jackson dan John R. Bolton (Sukarwo, 2009). Dalam konteks menyerang Iran, PNAC membentuk sebuah komite untuk pembebasan rakyat Iran yang disebut dengan komite OIL (*Operation Iranian Liberation*) (Shoelhi, 2007). Nama OIL dimaknai sebagai usaha membebaskan Iran dari penguasa garis keras Iran.

Gagasan untuk membentuk PNAC berasal dari DPG 1992. Para penandatanganan awal dokumen pendirian mereka adalah orang-orang yang berasal dari kalangan akademis dan politikus. Beberapa orang diantaranya bahkan memegang jabatan penting dalam rezim Presiden Bush. Para

penandatanganan itu adalah Elliot Abrams, Gary Bauer, William J. Bennet, Jeb Bush, Dick Cheney, Elliot A. Cohen, Midge Decter, Paula Dobriansky, Steve Forbes, Aaron Friedberg, Francis Fukuyama, Frank Gaffney, Fred C. Ikle, Donald Kagan, Zalmay Khalilzad, I Lewis Libby, Norman Podhoretz, Dan Quayle, Peter W. Rodman, Stephen P. Rosen, Henry S. Rowen, Donald Rumsfeld, Vin Weber, George Wiegell dan Paul Wolfowitz (Sukarwo, 2009).

Berikut ini adalah *statement of principles* dari PNAC (*Project for New American Century*) yang diusung oleh kelompok Neokonservatif.

Ketika abad ke-20 akan berakhir, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan unggul di dunia. Setelah memimpin Barat meraih kemenangan dalam Perang Dingin, Amerika mendapatkan suatu kesempatan dan tantangan: apakah Amerika Serikat memiliki visi untuk membangun berdasarkan apa yang telah dicapai dalam decade-dekade sebelumnya? Apakah Amerika Serikat telah memutuskan untuk membentuk abad baru yang menguntungkan bagi kepentingan-kepentingan dan prinsip Amerika? Yang kita butuhkan adalah militer yang kuat dan siap menghadapi baik tantangan masa kini maupun masa depan; sebuah kebijakan luar negeri yang tegas dan dengan tujuan tertentu untuk memperjuangkan prinsip-prinsip Amerika di luar negeri; dan kepemimpinan nasional yang menerima tanggung jawab global Amerika Serikat. Tentu saja, Amerika Serikat harus bijaksana dalam menggunakan kekuatannya. Tetapi, kita tidak dapat dengan aman menghindari tanggung jawab kepemimpinan global. Amerika Serikat memiliki peranan besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Eropa, Asia dan Timur Tengah. Jika kita melalaikan tanggung jawab, kita menghadapi tantangan pada kepentingan-kepentingan fundamental. Sejarah abad ke-20 semestinya telah mengajari kita bahwa adalah penting menciptakan sebuah lingkungan sebelum muncul krisis; dan mengatasi ancaman-ancaman sebelum ancaman itu berubah

menjadi mengerikan (Sukarwo, 2009: 216-217).

Hubungan antara pemerintah Bush dengan kelompok Neokonservatif telah melahirkan suatu bentuk hubungan korporatisme. Wirawan Sukarwo dalam bukunya yang berjudul *Tentara Bayaran AS di Irak* tahun 2009, menyebutkan bahwa bentuk hubungan antara pemerintahan sebuah negara dengan kelompok kepentingan disebut korporatisme negara atau pemerintahan korporatisme. Korporatisme adalah suatu pendekatan yang menekankan hubungan antara negara dan kelompok kepentingan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah korporatisme sering digabung dengan kata negara atau pemerintahan (Sukarwo, 2009).

Dalam buku yang ditulis oleh Nur Iman Subono pada tahun 2003 yang berjudul *Taktik Negara Menguasai Rakyat*, dituliskan beberapa definisi yang terkait dengan korporatisme dalam perspektif sistem pemerintahan. Menurut Subono, korporatisme merujuk kepada sebuah sistem pemerintahan jenis baru yang ditandai dengan kekuatan negara dan pengaturan kelompok-kelompok perwakilan kepentingan dalam masyarakat berdasarkan relasinya dengan negara (Subono, 2003).

Menurut Phillipe Schmitter, munculnya pemerintahan korporatisme merupakan jawaban sekaligus respons terhadap kebutuhan kapitalisme untuk menciptakan suatu rencana atau aransemen politik yang kondusif bagi pembangunan ekonomi (Schmitter, 1974).

Menurut Guillermo O'Donnel, munculnya pemerintahan korporatisme mengacu pada awal perkembangan kapitalisme saat negara sangat dominan. Peran negara sangat otonom dalam mendistribusikan kekuasaan kepada masyarakat dan arah pembangunan ekonomi. O'Donnel memiliki teori rezim birokratik otoriter sebagai eksekusi dari model pemerintahan korporatisme. Menurutnya, ciri-ciri dari rezim birokratik otoriter adalah

sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan negara didominasi oleh koalisi militer, teknokrat sipil dan perusahaan swasta besar; (2) Menerapkan stabilitas dengan pendekatan kekerasan dalam mengamankan program ekonomi; (3) Peniadaan politik dengan melakukan kontrol yang ketat untuk mengeliminasi aktivitas politik dan menghapus lembaga demokrasi politik; (4) Sistem ekonominya bertolak pada akumulasi modal yang cenderung oligopolistic dari kepentingan modal pribadi atau lembaga-lembaga negara; (5) Depolitisasi dan mengurangi isu politik yang kemudian menjadi masalah teknis dan hanya dapat dipecahkan antara para pejabat (O'Donnel, 1979: 290-294).

Hubungan yang kuat antara kelompok Neokonservatif dan pemerintah Bush melahirkan sebuah bentuk pemerintahan korporatisme. Dengan hubungan yang kuat tersebut, maka anggota-anggota kelompok Neokonservatif menjadi anggota di dalam kabinet pemerintahan Bush.

ALASAN KAUM NEOKONSERVATIF MENERAPKAN KEBIJAKAN INTERVENSI MILITER TERHADAP IRAN

A. PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN

Program pengembangan nuklir Iran di dalam negerinya merupakan permasalahan besar yang harus dihadapi Amerika Serikat. Program nuklir ini memungkinkan Iran untuk membuat senjata nuklir. Terkait hubungan Amerika Serikat dan Iran yang tidak bersahabat setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979, senjata-senjata nuklir yang dibuatnya tersebut kemungkinan besar akan diberikan kepada kelompok teroris untuk menyerang daratan Amerika Serikat dalam skala yang lebih luas dari peristiwa 9/11. Selain itu, senjata nuklir tersebut dapat digunakan Iran untuk menyerang Israel dan pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Ketika Mahmoud Ahmadinedjad menjadi pemimpin Iran, program pengembangan nuklir Iran dijalankan secara tersembunyi. Pengembangan nuklir tersebut baru diketahui

dunia internasional ketika pada 15 Agustus 2003. Kelompok oposisi Iran yang terurus (*Mujahidin-e-Khalq Organization*/MKO) memberitahu pemerintah Amerika Serikat bahwa Iran telah membangun dua fasilitas nuklir di Isfahan dan Natanz. Pernyataan MKO ini terbukti setelah CNN menayangkan foto-foto satelit keberadaan pabrik-pabrik nuklir Iran. Maka pada tahun 2007, kepala IAEA Mohammad El-Baradei mengunjungi fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Isfahan. Direktur IAEA, Mohammad Al-Baradei, pada saat mengunjungi fasilitas nuklir di Natanz, menemukan 164 buah mesin pemisah yang telah terpasang dan juga 10.000 mesin pemutar yang dapat memutar gas UF₆ pada kecepatan tinggi untuk menghasilkan uranium yang diperkaya (*enriched uranium*). Menurut El-Baradei, Iran sendiri mengaku telah menghasilkan dan menyimpan 175 ton UF₆ yang bisa menghasilkan uranium diperkaya untuk dua puluh bom nuklir seperti yang digunakan di Hiroshima (Naji, 2009).

B. DUKUNGAN IRAN KEPADA KELOMPOK-KELOMPOK TERORIS

Dukungan Iran kepada kelompok-kelompok teroris merupakan permasalahan besar yang harus dihadapi Amerika Serikat. Iran telah lama menjadi pendukung Al-Qaeda, Jihad Islam dan Hizbullah (Mearsheimer dan Walt, 2010). Iran kerap kali melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok teroris tersebut dalam melakukan kegiatan terorisme. Bahkan kelompok Hizbullah adalah kelompok yang dibentuk oleh Iran (Boroumand, 2002). Menurut laporan *Times of London* tahun 1998, yang dikutip dalam buku tulisan Lada Boroumand tahun 2002 yang berjudul *Teror, Islam dan Demokrasi*, kelompok Hizbullah telah melakukan kerjasama dengan jaringan Al-Qaeda dalam operasi-operasi internasional sejak awal 1990-an (Boroumand, 2002). Kemudian jaringan teroris Hizbullah di Lebanon yang terdiri atas kelompok Sunni, Syiah dan sebuah sayap Arab Saudi juga pernah melakukan kerjasama dalam pengeboman Menara

Khobar pada tahun 1996. Pengeboman ini menewaskan 19 anggota pasukan Amerika Serikat (Boroumand, 2002).

C. PELUANG IRAN UNTUK MENDOMINASI KAWASAN MINYAK DI TIMUR TENGAH

Peluang Iran untuk mendominasi Kawasan minyak di timur tengah merupakan permasalahan besar yang harus dihadapi Amerika Serikat. Sebelumnya Irak telah menjadi pesaing utama Iran di Kawasan Timur Tengah, tetapi saat ini Irak berada dalam kondisi tidak baik sehingga tidak berada dalam posisi untuk mengimbangi Iran. Sejak pasukan Amerika Serikat melakukan intervensi militer terhadap Irak, kondisi negara tersebut berada dalam kehancuran. Irak harus melewati masa transisi yang pahit. Kondisi negara tersebut juga diperburuk dengan pemberontakan-pemberontakan terhadap pasukan Amerika yang ditempatkan di Irak pasca invasi, yang disewa pemerintah Amerika melalui perusahaan-perusahaan penyedia mereka. Pergeseran keseimbangan regional ini menerangkan mengapa sebagian orang berkomentar bahwa pemenang dalam Perang Irak (lawan Amerika) adalah Iran (*Los Angeles Times*, 2006). Dengan tidak adanya pesaing kuat seperti Irak di Timur Tengah, maka Iran memiliki peluang yang sangat besar untuk mendominasi kawasan minyak di Timur Tengah.

John Mearsheimer dan Stephen Walt dalam bukunya yang berjudul *Dahsyatnya Lobi Israel* pada tahun 2010 menyatakan bahwa intervensi militer yang akan dilancarkan Amerika terhadap Iran adalah demi menguasai cadangan minyak Iran dan demi kepentingan perusahaan tertentu seperti Halliburton yang dimiliki oleh Wakil Presiden Dick Cheney. Masyarakat dunia pun menganggap bahwa pemerintah Bush memiliki tekad untuk menguasai cadangan minyak di Iran di mana hal tersebut akan memberi Amerika Serikat posisi tawar yang sangat tinggi dalam geopolitik. Selain itu, Amerika juga dapat bekerjasama dengan produsen-produsen penghasil minyak di Iran sehingga perusahaan-perusahaan minyak

Amerika akan mendapatkan keuntungan dengan membantu mereka mengembangkan sumber daya minyak dan membawa hasilnya ke pasar (Mearsheimer dan Walt, 2010).

D. PENYANGKALAN IRAN TERHADAP HOLOCAUST

Penyangkalan Iran terhadap *Holocaust* merupakan permasalahan besar yang harus dihadapi Amerika Serikat. Pemimpin Iran, Khamenei dan Mahmoud Ahmadinedjad sering mempublikasikan pertanyaan mengenai apakah *Holocaust* sesungguhnya pernah terjadi. Pada 24 April 2001, pemimpin Iran Khamenei bergabung dengan kelompok sejarahwan revisionis dan sejarahwan neo-Nazi terkemuka untuk menjadi pemimpin Iran pertama yang mengungkapkan kesangsian mengenai *Holocaust*. Dalam pertemuan ini, Khamenei menyatakan bahwa ada bukti yang menunjukkan bahwa kaum Zionis memiliki hubungan erat dengan Nazi Jerman. Menurut Khamenei, kaum Zionis membesar-besarkan angka statistik terkait pembunuhan massal orang Yahudi untuk menghimpun simpati demi upaya menduduki Palestina. Pernyataan Khamenei didukung oleh Presiden Iran Mahmoud Ahmadinedjad. Ia menentang angka enam juta atas kematian orang Yahudi dalam peristiwa *Holocaust*. Ia menyatakan ketidakpercayaannya atas *Holocaust* ini. Pada tanggal 14 desember 2005, Ahmadinedjad berpidato di Zahedan, kota kawasan barat daya Iran, salah satu daerah paling tertinggal yang mayoritas penduduknya beraliran Sunni. Pidato ini disiarkan secara luas oleh televisi Iran. Dalam pidatonya ini, Ahmadinedjad menyatakan bahwa orang-orang Eropa telah menciptakan mitos bernama *Holocaust* untuk membantu kaum Yahudi mendapatkan tanah Palestina (ISNA, 2001).

Sikap penyangkalan Iran terhadap *Holocaust* telah menyinggung perasaan bangsa Israel. Sikap Iran yang melukai Israel ini pastinya memicu kemarahan Amerika Serikat. Dengan demikian, sikap penyangkalan Iran terhadap *Holocaust* ini bertujuan untuk menunjukkan sikap

perlawanan Iran kepada bangsa Amerika yang selama ini selalu mencoba menghentikan program nuklirnya. Sikap ini juga sebagai bentuk provokasi agar seluruh negara-negara di Timur Tengah bersatu dengan Iran untuk mengusir Israel dari tanah Palestina sebagai bagian dari rencana Iran untuk menghilangkan segala bentuk pengaruh Amerika di Timur Tengah.

CARA KAUM NEOKONSERVATIF MEREALISASIKAN AGENDA KEBIJAKAN MILITER TERHADAP IRAN

Untuk merealisasikan tujuannya, kelompok Neokonservatif melakukan upaya-upaya untuk memengaruhi lembaga legislatif dan lembaga eksekutif Amerika Serikat agar pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan intervensi militer terhadap Iran.

A. KELOMPOK NEOKONSERVATIF MEMPENGARUHI LEMBAGA LEGISLATIF

AIPAC memegang peran paling penting untuk memengaruhi Kongres Amerika Serikat. Pada tahun 2006, ketika pemilihan umum calon anggota legislatif sedang berlangsung, AIPAC terus mengikuti perkembangan hasil pemungutan suara di Kongres dan menyediakan catatan tersebut bagi para anggotanya untuk memutuskan calon mana atau komite aksi politik mana yang harus didukung (Mearsheimer dan Walt, 2010). Setelah mengikuti hasil perkembangan pemungutan suara di Kongres, anggota-anggota AIPAC bersepakat untuk mendukung Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse, Robert Menendez (Partai Demokrat-New Jersey), Brad Ellsworth (Partai Demokrat-Indiana), Gary Ackerman dan Tom Lantos (*CounterPunch.org*, 2006).

Setelah menunjuk mereka menjadi calon anggota Kongres yang akan didukung, AIPAC mengadakan pertemuan dengan mereka. Dalam pertemuan yang diadakan AIPAC, para calon ini menerima informasi yang mendalam untuk membantu mereka memahami secara lengkap situasi tentang

Timur Tengah secara keseluruhan. Kemudian AIPAC mengarahkan pengaruhnya dengan membujuk para calon tersebut untuk mengikuti arahnya agar menjalankan agenda kebijakan kelompok Neokonservatif. Setelah para calon bersepakat untuk memenuhi segala tuntutan AIPAC, para calon tersebut diberi dana kampanye untuk mendapatkan akses (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Berdasarkan data *Federal Election Commission* (FEC), sekitar 46 anggota dewan direksi AIPAC memberikan sumbangan lebih dari 3 juta dollar untuk para calon legislator yang pro-Neokonservatif (*American Prospect*, 2002). Sedangkan menurut *Washington Post* tahun 2004, anggota-anggota dewan AIPAC telah menyumbangkan sekitar 72.000 dolar kepada komite-komite politik (*Washington Post*, 2004).

Sementara itu, *Center for Responsive Politics* (CRP) menyatakan bahwa 30 komite aksi politik pro-Neokonservatif telah terjun secara aktif dalam pemilihan umum dan pada sekitar pertengahan tahun 2006 kelompok ini telah memberikan lebih dari 3 juta dollar kepada calon-calon dari kedua partai (*OpenSecrets*, 2006). Selain itu menurut *Economist*, kelompok Neokonservatif telah menyumbangkan hampir 57 juta dollar kepada calon dan partai-partai (*Economist*, 2007).

Selain memberikan dukungan keuangan kepada para calon yang didukung, AIPAC juga membantu menghubungkan calon-calon tersebut dengan donor-donor dan sumber-sumber dana lain. AIPAC mengatur pertemuan-pertemuan para calon legislatif tersebut dengan para calon donor dan penggalang dana. Setelah membuat kesepakatan dengan AIPAC, para calon anggota Kongres yang didukung oleh AIPAC tersebut mendapatkan sejumlah besar dana yang akan digunakannya dalam pertarungan pemilihan umum (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Pada tahun 2006 Senator Joseph Lieberman menerima lebih dari 145.000

dollar dari kelompok Neokonservatif untuk mempertahankan kursinya dari calon independent Ned Lamont dalam pemilihan primer partai Demokrat. Dalam tahun yang sama, kelompok Neokonservatif memberikan sumbangan senilai 76.000 dolar kepada Sheldon Whitehouse untuk mengalahkan pemangku jabatan Senator Lincoln Chaffee dari partai Republik-Rhode Island (*Opensecrets*, 2006).

Kelompok Neokonservatif juga memberikan sumbangan keuangan kepada Robert Menendez (Partai Demokrat-New Jersey) dan Brad Ellsworth (Partai Demokrat-Indiana). Pada tahun 2006 dalam sebuah pemilihan umum untuk komisi-komisi yang berurusan dengan Timur Tengah, anggota kelompok Neokonservatif, Waxman mendudukan Gary Ackerman (Partai Demokrat-New York) menjadi anggota Kongres. Sementara itu seorang pendukung Neokonservatif lainnya yaitu Tom Lantos (Partai Demokrat-California) menjadi ketua *Committee on Foreign Affairs* (JTA.org, 2006).

Selain memberikan dukungan keuangan kepada para calon legislatif yang mendukung agenda kaum Neokonservatif, AIPAC akan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak bersedia melaksanakan agenda kelompok Neokonservatif dengan cara mengalihkan aliran dana kampanye kepada lawan politiknya. Pada tahun 2002, anggota AIPAC yang mengarahkan pembuatan kebijakan AIPAC, Mayer Mitchell menyingkirkan anggota Kongres Earl Hilliard (Partai Demokrat-Alabama). Mitchell mengalihkan dana kampanye Hilliard kepada lawan politiknya sehingga Hilliard memperoleh bantuan keuangan dari para pendukung AIPAC di seluruh negeri. Akibatnya, Earl Hilliard kehilangan jabatannya sebagai anggota Kongres (*New York Times*, 2002).

Di tahun 2006, anggota Kongres perempuan Cynthia McKinney (Partai Demokrat-Georgia) tidak bersedia melaksanakan agenda kelompok Neokonservatif. Maka AIPAC mengucurkan

dana kampanye ke lawan politiknya. Akibatnya McKinney diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Kongres dan ketika ia mengikuti pemilihan ulang 2006, kelompok Neokonservatif memberikan dana kampanye kepada lawan politiknya, Hank Johnson sekurangnya 34.000 dolar sehingga McKinney mengalami kekalahan (*Hillnews*, 2006).

Kelompok Neokonservatif selain memberikan dukungan keuangan kepada anggota legislatif juga memberikan dukungan keuangan kepada para pembuat undang-undang. Pegawai Staf Kongres ini merupakan unsur utama dalam proses legislatif. Kelompok Neokonservatif biasa menyebut dukungan keuangan yang diberikan kepada para pembuat undang-undang ini sebagai subsidi legislatif. Menurut kelompok Neokonservatif, subsidi legislatif ini untuk mengarahkan undang-undang agar sesuai dengan agenda mereka. Subsidi legislatif ini akan diberikan kepada para pembuat undang-undang untuk menganalisis masalah, membuat kerangka legislasi dan menawarkan jasa menyusun pokok-pokok pembahasan untuk pidato di depan konstituen (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Ada kalanya perwakilan-perwakilan dari kelompok Neokonservatif ikut ambil bagian secara langsung dalam proses ini. Mereka membantu para staf membuat draf untuk legislasi, memasok mereka dengan pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan oleh legislator di depan umum, membantu menuliskan surat-surat "*Dear College*" yang dikirimkan oleh para legislator untuk merapatkan barisan seputar isu-isu penting dan merumuskan serta mengedarkan surat-surat terbuka yang dirancang untuk menyampaikan tekanan Kongres kepada lembaga eksekutif. AIPAC juga membantu para pembuat undang-undang ini untuk membuat draf pidato, membuat rancangan undang-undang, memberika saran seputar taktik, menyelenggarakan penelitian, mencari sponsor dan mencari dukungan (Mearsheimer dan Walt, 2010). Dengan demikian, kelompok Neokonservatif telah memberikan pengaruh secara langsung ke

dalam proses legislatif dan proses pembuatan kebijakan di dalam pemerintah Bush.

Pada tanggal 19 Mei 2003, seorang anggota kelompok Neokonservatif Senator Sam Brownback mengumumkan bahwa ia mempunyai rencana mengajukan legislasi untuk mendanai kelompok-kelompok oposisi dan mendukung demokrasi di Iran. Legislasi yang disebut *Iran Democracy Act* didukung oleh AIPAC, JINSA dan *Coalition for Democracy in Iran*, dengan pendiri antara lain Morris Amitay dari JINSA dan Michael Ledeen dari AEI (*National Iranian American Council*, 2003).

Jadi, kelompok Neokonservatif memberikan dana kepada para pembuat undang-undang untuk membuat *Iran Democracy Act*. Sementara itu, perwakilan-perwakilan dari kelompok Neokonservatif ikut ambil bagian secara langsung dalam proses dengan membuat draf untuk legislasi, memberikan pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan oleh legislator di depan umum tentang ancaman Iran dan menuliskan surat-surat "*Dear College*" yang dikirimkan oleh para legislator untuk merapatkan barisan seputar isu-isu program nuklir Iran dan dukungan Iran terhadap kelompok teroris.

Setelah itu, rencana undang-undang tersebut diajukan di *House of Representatives* dan Senat oleh Brad Sherman (Partai Demokrat-California). Ketika rencana *Iran Democracy Act* tersebut diajukan di Kongres, tidak ada perdebatan sengit yang terjadi. Biasanya isu-isu yang terkait dengan aborsi, pengawasan senjata, lingkungan, kebijakan perdagangan, penanganan kesehatan dan imigrasi akan selalu memicu perdebatan di Kongres ketika diajukan. Akan tetapi ketika kelompok Neokonservatif mengajukan isu seputar rencana demokrasi di Iran, para pengkritik di Kongres bungkam dan tidak melakukan debat. Tidak ada kritik terhadap kelompok Neokonservatif dan tidak ada pertimbangan di dalam Kongres ketika membahas *Iran Democracy Act* tersebut.

Maka dari itu, pada akhir Juli 2003, legislasi *Iran Democracy Act* tersebut

diloloskan oleh kedua lembaga di Kongres, walaupun pasal tentang pendanaan dihilangkan dari naskah finalnya. Tanpa perdebatan, Kongres Amerika Serikat meluluskan sebuah undang-undang yang mendukung penggantian rezim di Iran (*CQ Today*, 2007).

Bahkan pada pertengahan Maret 2007, Kongres membantu kelompok Neokonservatif untuk mencoba menyisipkan sebuah syarat tambahan rencana anggaran Pentagon yang akan memerlukan pengesahan dari Presiden Bush sebelum digunakan untuk menyerang Iran ke dalam undang-undang tersebut (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Akan tetapi AIPAC menentang dengan tegas. AIPAC memandang rencana anggaran Pentagon tersebut akan menggagalkan opsi militer terhadap Iran dari *Iran Democracy Act*. Tanpa perdebatan, Kongres menyetujui saran AIPAC tersebut. Dengan bantuan beberapa wakil rakyat seperti Gary Ackerman, Eliot Engel dan Shelley Berkley (Partai Demokrat-Nevada), syarat tambahan dari rencana Pentagon tersebut dihilangkan (*CQ Today*, 2007).

B. KELOMPOK NEOKONSERVATIF MEMPENGARUHI LEMBAGA EKSEKUTIF

Setelah berhasil membuat Kongres Amerika Serikat meluluskan sebuah undang-undang yang mendukung penggantian rezim di Iran, anggota kelompok Neokonservatif seperti Elliot Abrams, Karl Rove, John Bolton, Douglas Feith, Aaron Friedberg, John Hannah, I. Lewis Libby, William Lutti, Richard Perle, Paul Wolfowitz dan David Wurmser melakukan perundingan (McClellan, 2008), untuk menyerahkan legislasi tersebut kepada Presiden Bush. Seperti yang kita ketahui, Elliot Abrams dan Karl Rove merupakan penasihat senior Presiden Bush. Selain menjadi penasihat senior Presiden Bush, Karl Rove juga merupakan ahli strategi politik di dalam pemerintahan Bush yang memiliki kewenangan sangat besar di Gedung Putih. Karl Rove juga dikenal sebagai orang yang

sangat dekat dengan Presiden Bush dan menjadi orang yang membuat Presiden Bush duduk di kursi kepresidenan Amerika Serikat. Presiden Bush hampir selalu mengikuti arahan Karl Rove dalam menjalankan roda pemerintahan Amerika. Karl Rove menjadi salah satu dari pemain kunci bagaimana Gedung Putih dijalankan. Rove bertanggungjawab mengawasi politik dan strategi politik serta mengendalikan empat kantor penting di dalam Gedung Putih. Keempat kantor tersebut adalah kantor Inisiatif Strategis, Kantor Urusan Politik, Kantor Hubungan masyarakat dan Kantor Urusan Antar Pemerintah (McClellan, 2008).

Ketika legislasi *Iran Democratic Act* diserahkan kepada Presiden Bush, ia tidak mengkritik atau memperdebatkan legislasi tersebut. Ia mempelajarinya dengan baik. Setelah mempelajari dengan seksama, George W. Bush kemudian melaksanakan undang-undang tersebut. Langkah pertama yang dijalankan Presiden Bush dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut adalah mendanai kelompok-kelompok pembelot Iran untuk mendukung misi Amerika dalam melakukan serangan terhadap Iran. Selanjutnya, pemerintah Bush menunjuk Douglas Feith untuk memainkan peran yang pokok dalam mengembangkan rencana pelaksanaan intervensi militer terhadap Iran (*Rolling Stones*, 2006).

Dalam artikel *The Coming Wars*, wartawan terkemuka Amerika Serikat Seymour Hersh memaparkan bahwa intervensi militer yang dijalankan pemerintah Bush kepada Iran akan dilakukan secara diam-diam dan melibatkan serangan udara. Dalam artikel *The Iran Plans*, Seymour Hersh memaparkan rencana operasi klandestain di Iran dan rencana serangan udara yang akan dilakukan pemerintahan Bush terhadap Iran. Menurut Hersh, pemerintah Bush akan menghancurkan instalasi nuklir Iran adalah dengan mengebom bunker dengan menggunakan penghancur nuklir taktis seperti B61-11 (*New Yorkers*, 2006).

Lebih lanjut McInerney mengungkapkan rincian peralatan perang Angkatan Udara AS yang dilibatkan dalam operasi militer ke Iran, meliputi enam puluh pesawat siluman, pesawat pembom B-2, pesawat tempur F-117 and F-22. Pesawat-pesawat perang Angkatan udara ini akan menjadi bagian dari serangan pertama ke Iran. Pesawat pembom B-2 ini mampu melepaskan sekitar 80 sampai 250 kilogram bom di 80 tempat berbeda yang menjadi target secara simultan. Sedangkan serangan udara kedua akan melibatkan empat ratus pesawat (B-52, B-1, F-15 dan F-18). Lima ratus misil akan ditembakkan ke arah target-target di Iran dari kapal-kapal perang Amerika Serikat ini. Sementara seratus lima puluh pesawat khusus akan dikirim untuk melakukan pengisian bahan bakar dan operasi intelejen (*NewsCenter/middle-east/Democracy Now*, 2007).

Adapun perusahaan pabrik kimia Amerika Serikat, Bechtel yang memproduksi sarin dan gas mustard untuk membunuh para pemberontak Iran, Kurdi dan Syiah, menyediakan jet-jet tempur, tank, misil dan melatih tantara untuk mengoperasikannya (Perkins, 2007).

Selain itu, pakar-pakar sipil Departemen Pertahanan, di bawah pimpinan Douglas Feith, telah bekerja bersama perencanaan-perencana dan konsultan-konsultan Israel untuk mengembangkan dan menghaluskan rencana penyerangan sasaran-sasaran nuklir, senjata kimia dan peluru kendali di wilayah Iran. Pentagon juga telah melakukan operasi pengumpulan informasi intelijen di wilayah Iran dan telah memperbarui rencana cadangannya untuk penyerbuan yang lebih luas ke Iran (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Sementara itu, Yerry Niko dalam artikel di *NewsCenter/middle-east/Democracy Now* pada 16 Februari 2007 menyatakan bahwa di sebelah utara Iran, tepatnya di Azerbaijan, militer Amerika telah mempersiapkan markas militer dalam skala besar. Markas ini dipersiapkan dengan perbekalan logistik untuk pasukan multinasional serta pasokan amunisi. Azerbaijan dipilih karena memiliki kedekatan dengan etnis minoritas Azeri yang

sedang melawan Iran. Dalam artikel tersebut, Yerry Niko juga mengatakan bahwa AS telah menempatkan kapal induk *USS John C Stennis* serta *USS Dwight D Eisenhower* di Teluk Persia. *USS John C Stennis* adalah kapal induk *Nimitz* bertenaga nuklir yang dapat menampung 5.000 awak sekaligus 80 pesawat tempur (*Newscenter/middle-east/Democracy Now*, 2007).

Sebelum memainkan peran yang pokok dalam melaksanakan intervensi militer terhadap Iran, pada tahun 2007, pemerintahan Bush melakukan aksi-aksi konfrontatif yang ditujukan langsung ke Iran. Aksi-aksi konfrontatif tersebut merupakan realisasi dari *Iran Democratic Act*. Hanya saja berada dalam skala kecil. Tujuannya adalah sebagai persiapan untuk aksi konfrontatif dalam skala besar. Aksi-aksi ini juga sebagai latihan langsung untuk aksi dalam skala besar.

Pada Kamis 11 January 2007, pasukan marinir Amerika Serikat mencoba menangkap panglima-panglima Pengawal Revolusi dan Brigade Quds yang menurut laporan beroperasi di Irak. Lima buah helikopter Amerika Serikat berkumpul di atas sebuah Gedung di Arbil, Irak. Dari helikopter-helikopter tersebut, puluhan marinir Amerika Serikat turun ke atap Gedung menggunakan tali (*Baztab*, 2007).

Di darat belasan *Humvee* dan kendaraan lapis baja pengangkut pasukan memblokir jalan-jalan di sekitarnya dan mengepung gedung konsulat tersebut. Setelah menempati posisi masing-masing, pasukan marinir dengan menggunakan pengeras suara, memberikan instruksi dalam Bahasa Inggris, Arab dan Persia kepada para penghuni gedung tersebut untuk keluar.

Karena tak ada satu orang pun yang keluar, pasukan marinir Amerika Serikat langsung mendobrak jendela dan melemparkan granat-granat pengejut. Asap mengepul dari jendela itu, isyarat bagi marinir-marinir lain untuk mendobrak pintu-pintu. Setelah masuk ke dalam gedung, pasukan marinir menangkap orang-orang yang sedang berada di dalam gedung

tersebut. Pasukan marinir juga mengambil dokumen dan komputer yang ada di situ (*Baztab*, 2007). Sementara itu di Washington, Presiden Bush berpidato kepada rakyatnya:

‘Selamat malam. Malam ini di Irak, Angkatan bersenjata Amerika Serikat sedang berjuang melakukan sesuatu yang akan menentukan arah perang global melawan terror yang mengancam keselamatan kita di sini. Strategi baru yang saya ringkaskan mala mini akan mengubah peran Amerika Serikat di Irak dan memudahkan keberhasilan kita dalam perjuangan melawan terror. Mula-mula kami akan menangani Iran dan Suriah. Dua rezim ini sengaja membiarkan teroris dan Gerakan perlawanan menggunakan wilayah mereka untuk keluar masuk Irak. Iran menyediakan dukungan baik logistik maupun personil serangan-serangan kepada pasukan Amerika Serikat. Kita akan menghentikan aliran dukungan dari Iran dan Suriah. Kita akan mencari serta menghancurkan jaringan yang memasok persenjataan modern dan pelatihan kepada musuh-musuh kita di Irak. Iran membentuk kelompok Syiah radikal membentuk pasukan berani mati di Irak. Akibat dari kegagalan ini jelas, Iran akan makin percaya diri dalam ambisi senjata nuklirnya. Kita akan mencegah Iran mencapai penguasaan senjata nuklir dan menjadi dominan di Kawasan ini.’ (*White House*, 2007).

Setelah melakukan aksi konfrontatif di Irak, pada 23 Mei 2007, sebuah kapal induk Amerika Serikat, sembilan kapal perang Amerika Serikat, dua kapal induk bertenaga nuklir yang membawa ratusan pesawat tempur dan 17.000 prajurit bergerak dalam formasi rapat melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Persia. Kemudian, Presiden Bush mengumumkan bahwa ia juga telah mengirimkan sebuah armada kapal induk tambahan ke Teluk Persia serta memasang sistem pertahanan anti peluru kendali *Patriot* untuk memperkuat negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council*. Ada sebuah laporan bahwa Amerika Serikat sedang mencoba gagasan penggunaan bom nuklir taktis untuk menyerang beberapa fasilitas

nuklir Iran yang telah dibangun jauh di bawah tanah (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Bersamaan dengan itu, pejabat-pejabat militer Amerika Serikat menemukan indikasi bahwa Iran mengirimkan komponen-komponen pokok untuk pembuatan ranjau-ranjau pinggir jalan berdaya ledak tinggi ke Irak untuk digunakan terhadap pasukan Amerika. Penasihat Keamanan Nasional Presiden Stephen Hadley dan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak mengesampingkan kemungkinan pasukan Amerika akan menyebrang ke wilayah Iran untuk memburu orang-orang Iran yang terlibat dalam pengiriman ranjau-ranjau darat dan senjata-senjata lain (*New York Times*, 2007).

PENUTUP

Program pengembangan nuklir Iran, dukungan Iran kepada kelompok teroris, penyangkalan pemimpin Iran terhadap *Holocaust* dan peluang Iran untuk mendominasi kawasan minyak di Timur Tengah telah menjadi suatu permasalahan besar bagi Amerika Serikat. Ketika pemasalahan ini muncul ke permukaan, sebuah mekanisme politik di dalam sistem politik luar negeri pemerintah Bush terbuka lebar. Ketika mekanisme politik ini terbuka lebar, kelompok Neokonservatif berupaya menerapkan agendanya di dalam pemerintahan George W. Bush. Selanjutnya, agenda kelompok Neokonservatif tersebut menghasilkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang radikal di Iran. Dalam kebijakan tersebut, kaum Neokonservatif menekankan perlunya Amerika Serikat menggunakan kekuatan militer terhadap Iran untuk menciptakan demokrasi di Iran.

Dalam upayanya untuk merealisasikan kebijakan radikal di Iran, kaum Neokonservatif memberikan pengaruh yang signifikan pada kedua lembaga penting di dalam pemerintahan Bush. Di lembaga legislatif, kaum Neokonservatif memberikan

dukungan keuangan yang sangat besar kepada para anggota Kongres agar membuat undang-undang yang sesuai dengan agenda kebijakannya. Di lembaga eksekutif, kaum Neokonservatif mendudukan anggota-anggotanya pada posisi-posisi penting seperti presiden, pejabat teras dan pembuat kebijakan. Presiden Bush sendiri adalah seorang presiden yang diposisikan oleh kaum Neokonservatif. Kemenangan George W. Bush memenangkan kursi kepresidenan Amerika adalah berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok Neokonservatif. Ketika kaum Neokonservatif menyerahkan agenda kebijakan radikal di Iran, Presiden Bush langsung melaksanakannya.

Dalam merealisasikan agenda kebijakan radikal kaum Neokonservatif terhadap Iran, pada tahun 2007, Presiden Bush memerintahkan pasukan Amerika untuk menangkap lima orang pejabat Iran yang sedang berada di Irak dengan menggunakan helikopter dan kendaraan lapis baja. Pada tahun yang sama, Presiden Bush memerintahkan angkatan laut Amerika untuk bergerak menuju Teluk Persia dengan menggunakan beberapa kapal induk dan pesawat-pesawat tempur Amerika. Akan tetapi realisasi intervensi militer skala besar belum sempat dilaksanakan oleh George W. Bush mengingat dalam waktu dekat ia harus segera meninggalkan kursi kepresidenan di Gedung Putih. Jadi, selama ia menjadi presiden, ia baru melaksanakan beberapa aksi konfrontatif dalam skala kecil terhadap Iran dalam upaya merealisasikan agenda kebijakan kelompok Neokonservatif yang radikal di Iran.

Dengan demikian, sistem politik Amerika di masa George W. Bush telah menghasilkan sebuah kebijakan radikal di Iran yang digerakan oleh kaum Neokonservatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Berger, Peter L. 1986. *The Capitalist Revolution: Fifty Proporsitions About Prosperity, Equality and Liberty*. New York.
- [2] Boroumand, Lada. 2002. *Teror, Islam dan Demokrasi*.
- [3] Heertz, Noreena. 2003. *Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme*, dalam I Wibowo dan Francis Wahono, editor. Neoliberalisme Yogyakarta. Cenderelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- [4] Ikenberry, G. John. 2001. *American Grand Strategy in The Age of Terror*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- [5] Merger, Martin N. 1987. *Elites and Masses: An Introduction to Political Sociology*. Wadsworth.
- [6] McClellan, Scott. 2008. *What Happened: Inside the Bush White House and Washington's Culture of Deception*. New York Times Publishing.
- [7] Mearsheimer, John J dan Walt, Stephen M. 2010. *Dahsyatnya Lobi Israel*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- [8] Naji, Kasra. 2009. *Ahmadinedjad: Kisah Rahasia Sang Pemimpin Radikal Iran*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [9] O'Donnel, Guilermo. 1979. *Tension in The Bureaucratic-Authoritarian State and The Authoritarianism in Latin America*. Princeton: University Press.
- [10] Perkins, John. 2007. *John Perkins: Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional*. Jakarta. Ufuk Press.
- [11] Pitaya, V. 2009. *Sepak Terjang Pasukan Komando*. Yogyakarta. Pinus Book Publisher.
- [12] Schmitter, Phillipe C. 1974. *Still the Century of Corporatism?* Dalam Pike, Frederick B dan Strich, Thomas. *The New Corporatism: Social Political Structures in The Iberian World*. Notre Dome: University of Notre Dome Press.
- [13] Shoelhi, Mohammad. 2007. *Di Ambang Keruntuhan Amerika*. Jakarta. Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu.
- [14] Subono, Nur Iman. 2003. *Taktik Negara Menguasai Rakyat: Sebuah Studi Teori Bentuk Pemerintahan Korporatisme*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- [15] Sukarwo, Wirawan. 2009. *Tentara Bayaran AS di Irak: Sebuah Konspirasi Neoliberal AS Memimpin Untuk Dunia*. Jakarta. Gagas Media.
- [16] Suroso, Bambang. 1995. *Kepemimpinan Reagan, Reaganomics dan Mekanisme Pasar Amerika Serikat (1981-1988)*. Tesis Master: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- [17] Tindall, George Brown. 1984. *America: A Narrative History, volume 1 dan 2*. New York: W. W. Norton&Company.
- [18] *American Prospect*. 2002.
- [19] *Associated Press*. 18 Juni 1998.
- [20] *Baztab*. 24 Januari 2007.
- [21] *Economist*. 2007.
- [22] *ISNA*. 2001.
- [23] *Reuters*. 16 Januari 1998. 2 Februari 1998. 8 Februari 1998. 21 Februari 1998.
- [24] *Washington Post*. 2004.